

KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

Oleh:

Nunik Kadarwati¹⁾, Endang Setiasih¹⁾, Rusmusi IMP¹⁾

¹⁾ Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

The research aims to measure the inequality of income distribution of each area and regional finance in Purbalingga District. The inequality of income distribution of each area was measured by the Williamson Index and the fiscal capacity was measured by the fiscal decentralization degree. The result of this research shows that the average of economic growth per year is 5.07 percent, the average of fiscal decentralization degree per year is 16.42 percent that it is included to a high level of fiscal dependency on the central government category, while the average of inequality of income distribution of each area per year is 0.45 that it is included to a medium inequality category.

Keywords: *fiscal, decentralization, inequality, income, distribution*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau sehingga membuat pengawasan dan program pembangunan daerah akan sulit untuk dilaksanakan dengan merata dan adil, serta kurang terlibatnya pemerintah daerah dalam pembangunan sehingga menjadikan terjadinya ketimpangan pembangunan di masing-masing daerah/wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan Daerah (Desentralisasi Fiskal) yang dimulai sejak 1 Januari 2001, dimana daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, sehingga daerah tersebut akan mampu melaksanakan pembangunan daerahnya semaksimal mungkin sehingga diharapkan pemerintah daerah akan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah serta dapat mengelola keuangannya sendiri sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembangunan antar daerah semakin berimbang. Untuk melaksanakan Undang-Undang otonomi daerah, maka masing-masing daerah diberi kesempatan untuk menggali potensi daerahnya sendiri, sehingga pendapatan daerah akan semakin meningkat. Keuangan daerah terbagi menjadi Empat komponen yaitu : 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2). Dana Alokasi Umum (DAU), 3). Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 4). Dana Bagi Hasil (DBH) yang meliputi: a. dana bagi hasil pajak dan b. dana bagi hasil bukan pajak..

Adanya pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan sendiri (desentralisasi

fiskal) ini menimbulkan masalah bagi daerah mengenai kemampuan masing-masing daerah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Untuk daerah yang sudah siap melaksanakan desentralisasi fiskal akan berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, namun bagi daerah yang belum siap mengelola atau melaksanakannya maka akan semakin tergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut karena daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat yang berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Hampir sebagian besar daerah, dana alokasi umum menjadi penyangga utama pembiayaan APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga untuk belanja proyek-proyek pembangunan menjadi kecil (Adrai, 2009). Sebetulnya tujuan kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat adalah; (Suparmoko 2001) a) mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, b) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, serta c). mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

METODE ANALISIS

1. Definisi Operasional Variabel

- Desentralisasi fiskal/kemampuan keuangan daerah: merupakan pelimpahan wewenang atas kebijakan untuk mengelola perekonomian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di kabupaten Purbalingga
- Pendapatan asli daerah : merupakan sumber penerimaan keuangan daerah kabupaten Purbalingga

- c. Dana alokasi umum : merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk kepentingan daerah kabupaten Purbalingga.
- d. Dana alokasi khusus: merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk kegiatan khusus di daerah kabupaten Purbalingga
- e. Derajat desentralisasi fiskal : merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah bagi kabupaten Purbalingga terhadap pemerintah pusat

2. Analisis data

- a. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan rumus: (Arsyad, 2003:23)

$$EGt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$$

- b. Untuk menganalisis Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan rumus: (Tim Litbang Depdagri bekerjasama dengan Fisipol UGM 1991)

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

DDF = derajat desentralisasi fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = total penerimaan daerah

- c. Kriteria tingkat kemandirian fiskal:

Tabel 1. Kemampuan Keuangan daerah

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri bekerjasama dengan Fisipol UGM 1991

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah digunakan rumus Variasi Williamson (Kuncoro, 2003) sebagai berikut :

$$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_j - \bar{Y})^2} \cdot \frac{P_j}{P}}{\bar{Y}}$$

Di mana :

VW = Variasi Williamson

Y_j = Pendapatan per kapita di wilayah ke j

$\bar{Y}$ = Pendapatan per kapita nasional

P_j = Penduduk di wilayah ke j

P = Penduduk total

Kriteria Indeks Willimason :

- a. Indeks Williamson (VW) yang diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1
- b. Jika VW mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah merata.
Jika VW mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah tidak merata.

HASIL ANALISIS

A. Profil Kabupaten Purbalingga

1. Letak Geografis

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian barat daya berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan. Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara. Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas. Sebelah Barat: Kabupaten Banyumas

2. Luas Wilayah.

Kabupaten Purbalingga luas wilayah 77.764.122 ha, atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah, terbagi menjadi 18 Kecamatan, terluas Kecamatan Rembang yaitu 9.159 ha dan yang paling sempit adalah Kecamatan Purbalingga.

3. Topografi

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Bagian Utara merupakan dataran tinggi meliputi: Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang dan sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Kaligondang, Bojongsari dan Mrebet. Untuk, sebelah Selatan merupakan dataran rendah, meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkong, Bukateja, Kejobong, Karangmoncol, Pengadegan, sebagian wilayah kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

4. Luas Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga terbagi atas: 28,05 persen untuk lahan sawah, 24,63 persen untuk lahan perkampungan, 0,02 persen untuk lahan perkebunan, 5,82 persen untuk lahan kebun campur, 21,30 persen untuk lahan tegalan, 14,57 persen untuk lahan hutan, 0,12 persen untuk lahan perikanan, dan 4,48 persen untuk lain-lain.

5. Pemerintahan

Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 239 desa/kelurahan (224 desa dan 15 kelurahan) terdiri dari 5.056 Rukun Tetangga

dan 1.545 Rukun Warga yang tersebar di 18 Kecamatan. Pegawai negeri sipil dan capeg di Kabupaten Purbalingga sebanyak 9.518 orang terdiri dari 5.097 orang laki-laki dan 4.421 orang perempuan.

6. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Purbalingga berjumlah 881.831 orang yang terdiri dari 435.547 orang laki-laki dan 446.284 orang perempuan, yang berwarga negara Indonesia berjumlah 881.751 orang dan yang berwarga negara asing berjumlah 80 orang. Penduduk Kabupaten Purbalingga yang berusia dibawah 15 tahun sebanyak 27,27 persen dan penduduk yang berusia 15 tahun keatas sebanyak 72,73 persen. Angkatan kerja sebanyak 76,63 persen yang terbagi 94,86 persen penduduk yang bekerja dan 5,14 persen penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Dari penduduk yang bekerja terbanyak bekerja di sektor industri pengolahan sebanyak 33,88 persen. (sakernas 2012).

7. Pertanian

Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa tanaman yang menonjol dilihat dari produksinya pada tahun 2012 antara lain : tanaman padi sawah (224.046 ton) naik dibanding tahun 2011 yang hanya 207.131 ton, ketela pohon (149.847 ton) meningkat dibanding tahun 2011 yang hanya berproduksi sebanyak 143.219 ton, jagung (53.243 ton) yang meningkat tajam dibanding tahun 2011 yang hanya 43.759 ton, padi ladang (2.773 ton) meningkat dibanding tahun 2011 yang hanya 2.107 ton, ketela rambat (2.370 ton) meningkat dibanding produksi tahun 2011 yang hanya 1.927 ton, kacang tanah (944 ton) untuk kacang tanah mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yang mencapai 1.548 ton, kedelai (258 ton) produksi kedelai mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yang berproduksi sebanyak 316 ton dan kacang hijau (26 ton) mengalami peningkatan yang tajam dibanding tahun 2011 yang hanya berproduksi sebanyak 9 ton.

Untuk tanaman sayur mayur yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Purbalingga adalah bawang daun, cabe, ketimun, tomat, buncis, labu siam, bayam, kangkung, terong, kobis, kacang-kacangan, kentang yang paling banyak dipanen seluas 392 ha dan menghasilkan 6.124 ton, pokcoy, bawang merah dan bawang putih. Untuk buah-buahan yang banyak dibudidayakan di kabupaten Purbalingga adalah alpukat, mangga, rambutan, duku, jeruk siam, durian, jambu biji, sawo, papaya, pisang merupakan buah yang paling banyak dipanen yaitu sebanyak 781.173 pohon dengan produksi mencapai 211.776 kw, salak, belimbing, sukun dan nanas.

Tanaman perkebunan yang paling banyak dibudidayakan di Kabupaten Purbalingga adalah kelapa dengan luas panen 12.246,96 ha dengan hasil 13.198,57 ton kopra sedang untuk kelapa deres produksi seluas 5.249,67 ha menghasilkan 56.110,44 ton gula cetak, kopi dengan produksi

seluas 1.208,26 ha dengan produksi 602,93 ton, gelagah arjuna, nilam, cengkih, melati gambir, lada dan teh rakyat. Ternak yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Purbalingga adalah ayam, itik, kambing, domba, sapi, dan kerbau.

8. Industri

Industri di Kabupaten Purbalingga dikelompokkan atas dasar banyaknya tenaga kerja yaitu: industri besar dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang ada 39 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 32.905 orang, industri sedang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20 – 99 orang ada 51 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 2.898 orang, industri kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 – 19 orang dan industri rumah tangga dengan tenaga kerja sebanyak 1 – 4 orang.

B. Desentralisasi Fiskal dan PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2001-2012

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang bagi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dimana terdapat dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penunjang kegiatan pembangunannya. Pemberian wewenang pengelolaan keuangan pada PEMDA tersebut dikarenakan pemerintah daerah dianggap lebih tahu mengenai apa sajakah permasalahan yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya dari daerahnya masing-masing. Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah sekaligus diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesenjangan fiskal merupakan selisih antara potensi fiskal yang dimiliki daerah tersebut dengan kebutuhan fiskal yang ingin dicapai oleh daerah tersebut.

Berikut Tabel 2 merupakan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Kabupaten Purbalingga:

Berdasarkan UU No.25 tahun 1999, perolehan dana perimbangan DBH yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah penyumbang hasil alam yang terbesar meliputi sumber daya hutan dan land rent pertambangan (Kuncoro, 2004).

Alasan tinggi rendahnya pemberian dana perimbangan yang diperoleh masing-masing daerah melalui proporsi alokasi DAU, karena daerah tersebut secara umum dianggap miskin dan terbelakang sehingga perlu menerima lebih banyak DAU dibanding daerah yang kaya. Suatu daerah dianggap miskin dan terbelakang apabila dilihat melalui beberapa indikator seperti

kepadatan penduduk, indeks harga bangunan,
poverty gap dan keadaan geografi (Kuncoro,
2004).

Tabel 2. Dana Perimbangan Kabupaten Purbalingga tahun 2001-2012

Tahun	DAU	DAK	DBH	Dana Perimbangan
2001	15122.50	224657.76	0.00	254902.76
2002	23603.06	234944.96	0.00	282151.08
2003	28300.57	254460.36	6100.00	317161.50
2004	28619.78	246694.00	12630.00	316563.56
2005	43553.51	282267.98	13000.00	382375.00
2006	47694.61	383925.00	27440.00	506754.22
2007	52727.44	48821.71	0.00	154276.59
2008	63799.02	45820.48	51047.00	224465.52
2009	83177.00	46210.15	51785.00	244971.17
2010	79803.18	464788.52	44809.00	669203.88
2011	94946.24	521932.24	67533.30	779358.02
2012	103756.00	640265.00	75989.64	923766.64
Rata-rata	55425.24	640265.00	29194.50	337488.22

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sedangkan tingginya perolehan dana perimbangan jika ditinjau melalui DAK, meliputi beberapa tujuan seperti:

1. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.
4. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia menurut Kadjarmiko (2000) dalam Abdul Halim (2012), bertujuan untuk:

- a. *Fiscal sustainability* dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro,
- b. Memperbaiki *vertical imbalance*, memperkecil ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Memperbaiki *horizontal imbalance*, memperkecil ketimpangan antardaerah dalam kemampuan keuangannya.
- d. Akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam peningkatan kinerja daerah.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
- f. Meningkatkan demokratis

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan agar daerah dapat lebih meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakatnya agar tujuan pembangunan daerah tercapai. Hal tersebut dapat ditinjau melalui kenaikan PDRB setiap tahunnya. Berikut merupakan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2. PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga konstan tahun 2001–2012 (dalam jutaan)

Tahun	PDRB (Dalam Jutaan Rupiah)
2001	1661656.60
2002	1730318.82
2003	1784728.21
2004	1844532.08
2005	1921653.92
2006	2018808.10
2007	2143746.23
2008	2257392.77
2009	2390244.57
2010	2525872.73
2011	2678085.09
2012	2845663.33
Rata-rata	2216102.24

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga 2013

Dari Tabel 2 terlihat bahwa produk domestik regional bruto Kabupaten Purbalingga dari tahun 2001 sampai 2012 selalu mengalami peningkatan, hal tersebut menandakan pembangunan di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami pertumbuhan. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga diperoleh hasil pada Tabel 3: Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,07 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 6,19 persen, kemudian pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,89 persen, dikarenakan pada waktu itu terjadi krisis ekonomi yang dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia. Tetapi setelah itu tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2001– 2013 Berdasarkan Harga Konstan (persentase)

No.	Tahun	PDRB (dalam Jutaan rupiah)	Persen
1	2001	1661656.60	4.13
2	2002	1730318.82	3.14
3	2003	1784728.21	3.35
4	2004	1844532.08	4.18
5	2005	1921653.92	5.06
6	2006	2018808.10	6.19
7	2007	2143746.23	5.30
8	2008	2257392.77	5.89
9	2009	2390244.57	5.67
10	2010	2525872.73	6.03
11	2011	2678085.09	6.26
12	2012	2845663.33	5.66
13	2013	3006626.67	
Rata-rata		2216102.24	5.07

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 diperoleh hasil tabel 4:

Tabel 5 menunjukkan bahwa selama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2001-2012, memiliki kemandirian keuangan daerah dengan kriteria yang kurang dengan angka rata-rata sebesar 16,42 % atau dapat dikatakan memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi kepada pemerintah pusat.

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila derajat desentralisasi fiskalnya minimal 20,01 persen. Walaupun Kabupaten Purbalingga pada beberapa tahun yaitu tahun 2007 sampai

tahun 2009 memiliki tingkat derajat desentralisasi fiskalnya cukup tinggi masing-masing sebesar 34,18 persen, 28, 42 persen dan 26,04 persen namun secara rata-rata memiliki tingkat kemampuan keuangan daerahnya masih rendah yaitu sebesar 16,42 persen dengan kriteria kurang, sehingga kabupaten Purbalingga masih sangat perlu untuk meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerahnya.

Berdasarkan perhitungan dengan rumus IW diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Perhitungan Indeks Williamson

Tahun	IW
2006	0.42
2007	0.44
2008	0.46
2009	0.47
2010	0.47
Rata-rata	0.45

Dari Tabel 6 terlihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga rata-rata sebesar 0,45, angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah sedang. Namun demikian angka IW dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Purbalingga kurang merata antar kecamatannya. Sesuai dengan teorinya Kuznet yang mengatakan bahwa suatu daerah yang baru mulai pembangunan akan mengalami ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, seiring perjalanan waktu pembangunan, maka distribusi pendapatan antar wilayah akan semakin merata.

Tabel 4. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Purbalingga tahun 2001 – 2012 (Rupiah)

No	Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH	TPD	DDF	Ket.
1	2001	15122.50	15122.50	224657.76	0.00	254902.76	5.93	sangat kurang
2	2002	23603.06	23603.06	234944.96	0.00	282151.08	8.37	sangat kurang
3	2003	28300.57	28300.57	254460.36	6100.00	317161.50	8.92	sangat kurang
4	2004	28619.78	28619.78	246694.00	12630.00	316563.56	9.04	sangat kurang
5	2005	43553.51	43553.51	282267.98	13000.00	382375.00	11.39	kurang
6	2006	47694.61	47694.61	383925.00	27440.00	506754.22	9.41	sangat kurang
7	2007	52727.44	52727.44	48821.71	0.00	154276.59	34.18	sedang
8	2008	63799.02	63799.02	45820.48	51047.00	224465.52	28.42	cukup
9	2009	63799.02	83177.00	46210.15	51785.00	244971.17	26.04	cukup
10	2010	79803.18	79803.18	464788.52	44809.00	669203.88	11.93	kurang
11	2011	94946.24	94946.24	521932.24	67533.30	779358.02	12.18	kurang
12	2012	103756.0	103756.00	640265.00	75989.64	923766.64	11.23	kurang
Rata-rata		55425.24	55425.24	640265.00	29194.50	337488.22	16.42	kurang

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun – tahun mengalami fluktuasi (naik turun), tetapi secara rata-rata terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen per tahun, walaupun kondisi tersebut masih tergolong kecil.
2. Derajat Desentralisasi Fiskal (kemandirian Keuangan daerah) Kabupaten Purbalingga rata-rata per tahun sebesar 16,42 persen, ini masuk golongan kurang.
3. Untuk ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah rata-rata sebesar 0,45, angka tersebut termasuk dalam kriteria ketimpangan yang sedang.

SARAN

1. Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga hendaknya terus menggali potensi daerahnya supaya dapat meningkatkan penerimaan asli daerahnya (PAD) sehingga tidak terus menerus tergantung dengan dana dari pemerintah pusat.
2. Hendaknya pemerintah Kabupaten Purbalingga lebih memperhatikan pemerataan pembangunan antar kecamatan agar ketimpangan distribusi pendapatan dapat ditekan atau tidak semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo & Sakata, Masayo. 2005. *“Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States,” Journal of Urban Economics, Elsevier*, vol. 52(1), Halaman 93-108.
- Arsyad, Lincoln. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Gemell, N. 1994. *Ilmu Ekonomi Pembangunan, Beberapa Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Irawan dan Suparmoko, 1995. *Ekonomi Pembangunan*. BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Jusuf SK. 2012. *Otonomi Daerah Di Persimpangan Jalan*. Tarakan : Pustaka Spirit.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan*

Kebijakan. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Loekita, B. 1978. Strategi Industrialisasi Versus Implementasinya. *Bulletin Ekonomi Bapindo*, 4 (1), 4 -14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saragih J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sasana, Hadi. 2009. *“Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Vol. 4, No. 7 halaman 1-21.
- Sjafrizal. *“Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat”*. PRISMA, No. 3 Tahun XXVI (Maret, 1997), hal 27-38.
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. LPFEUI. Jakarta.
- Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : ANDI
- Suprpto, Suyitno dan N. Widayaningsih, 1995. *Analisis Basis Ekonomi (Economic Base) di Propinsi Jawa Tengah*. Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi Unsoed, Purwokerto.
- Sutedi, Andrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah